

Analisis Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni Menurut Konsep Pendidikan Islam

Qomaruddin

ABSTRAK

Hegemoni adalah sebuah upaya pemahaman akan suatu kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk merubahnya. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelompok yang dipimpin. Hal ini terjadi dalam citra konsensual yang diciptakan melalui pengaruh terselubung lewat pengetahuan yang disebarakan melalui perangkat-perangkat kekuasaan ataupun dengan pemaksaan. Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah mata rantai strategi memperoleh kemenangan yang lebih banyak di dapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan dan pemaksaan terhadap kelompok lainnya. Gagasan ini muncul berbarengan dengan upaya Antonio Gramsci untuk memajukan revolusi sosialis dalam rangka menghancurkan tatanan dan sistem kapitalisme. Namun Antonio Gramsci menggunakan istilah ini sebagai konsep yang netral, tidak bersifat baik atau buruk. Artinya, ia menggunakan konsep hegemoni dalam kerangka realitas perjuangan kelompok dalam suatu tatanan masyarakat. Hegemoni suatu kelompok menunjukkan bahwa suatu kelompok tersebut telah mampu mempengaruhi kelompok sosial lainnya untuk menerima nilai-nilai politik, budaya, moral, adat, ajaran agama, ataupun nilai-nilai lainnya yang dikehendaki. Proses perebutan pengaruh tersebut dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Pemikiran Antonio Gramsci, Hegemoni dan Pendidikan Islam

A. Kebebasan Dan Demokrasi Dalam Pendidikan Islam

Bila kita perhatikan arah dari pendidikan modern di abad ke-20 ini serta kita pelajari pula prinsip-prinsip, metode-metode dan sistem-sistemnya, kita akan melihat bahwa pendidikan Islam telah berabad-abad sebelumnya menyuarakan banyak prinsip dari metode-metode penting dalam dunia pendidikan, telah bersaham dalam pembangunan mental dan pembentukan mental

Metode pendidikan dan pengajaran dalam rangka pendidikan Islam, sangat banyak terpengaruh oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan adanya prinsip-prinsip persamaan dan kesempatan dalam belajar, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang, pintu masjid dan institut-institut terbuka untuk semua, tanpa perbedaan si kaya dan si miskin, tinggi atau rendahnya kedudukan sosial seorang siswa, oleh karena di dalam Islam tidak ada kelebihan orang Arab dari yang bukan Arab, kecuali dengan taqwa. Bila seseorang memiliki keinginan untuk belajar dan rasa cinta untuk terus mencari ilmu, kegairahan untuk mengadakan penelitian dan pembahasan, pintu untuk belajar terbuka luas baginya, bahkan Islam mendorong supaya mereka belajar, apalagi bila seseorang itu mempunyai pembawaan cerdas.¹

¹M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal., 5-6

Belajar adalah suatu kewajiban agama yang diwajibkan oleh Islam atas setiap muslim laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, kaum hartawan dengan bersemangat mendirikan tempat-tempat belajar seperti masjid, institut, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, pondok pesantren, serta memperlengkapinya dengan buku-buku dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT., sehingga tempat-tempat pelajaran itu dapat memenuhi fungsinya seperti diharapkan, yaitu tersebarnya ilmu secara luas dan bersihnya jiwa manusia dari kotoran serta berpegangnya orang-orang terpelajar kepada budi-akhlak yang mulia. Dalam kompetensi terhormat antara kaum hartawan muslim dahulu dalam mendirikan institut-institut Islamiyah ini, kita dapat merasakan betapa mereka merasa bertanggungjawab terhadap penyebaran ilmu dan pengetahuan di kalangan kaum Muslimin.²

Sebagaimana dipaparkan pada bab III ada beberapa prinsip yang menjadi dasar pendidikan Islam, *pertama* prinsip integrasi yang menekankan pada bentuk pengabdian pada Allah, *kedua* prinsip keseimbangan yang menekankan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara material dan spiritual, jasmani dan rohani. *Ketiga* adalah prinsip persamaan, yaitu prinsip yang tidak membedakan derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan sosial, bangsa, maupun suku, ras, atau warna kulit. Sehingga budak sekalipun mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan dan yang *keempat* adalah prinsip pendidikan seumur hidup, prinsip ini bersumber dari pandangan mengenai kebutuhan dasar manusia dalam kaitan keterbatasan manusia di mana manusia dalam sepanjang hidupnya dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang kehinaan terakhir adalah prinsip keutamaan, prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah hanya proses mekanik melainkan merupakan proses yang mempunyai ruh dimana segala kegiatannya diwarnai dan ditujukan kepada keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan tersebut terdiri dari nilai-nilai moral. Nilai moral yang paling tinggi adalah tauhid. Sedangkan nilai moral yang paling buruk dan rendah adalah syirik. Dengan prinsip keutamaan ini, pendidik bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi subjek didik, tetapi lebih dari itu turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik tersebut.

Oleh karena itu, usaha dalam penyebaran ilmu pengetahuan itu bukan saja menjadi beban negara, tetapi kaum hartawan di waktu dulu--bukan di masa sekarang-- yakni mendirikan dengan kemampuan sendiri ruangan-ruangan untuk belajar, mereka berkorban sesuai dengan kesanggupan masing-masing, dengan arti mereka tidak menyerahkan saja beban secara keseluruhan kepada negara tetapi sebaliknya mereka bekerja sama dengan negara dalam rangka mendapat keridhoan Allah. Negara dalam hal ini membuat *planning* memberi petunjuk, pengarahan dan membantu pendirian gedung-gedung sekolah dan memperlengkapinya dengan alat-alat teleskop dan laboratorium pembantu sesuai dengan kebesaran, kemegahan dan kekuatan kerajaan Islam pada waktu itu. Pendidikan pada waktu itu tidak terikat kepada peraturan-peraturan kelas, ijazah-ijazah, pembayaran-pembayaran atau syarat-syarat yang bersifat penjajahan supaya tidak menjadi penghalang bagi orang-orang, pemuda-pemudi, buat menuntut ilmu pengetahuan. Dengan demikian pintu pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi setiap orang yang berkeinginan untuk belajar agama dan lain-lain kapan saja dan di mana saja. Inilah demokrasi yang hakiki di dalam konsep pendidikan dan pengajaran Islam.³

²*Ibid.*, hal. 6-7

³*Ibid.*, hal. 7

Dalam dunia pendidikan Islam dahulu, tidak terdapat apa yang dinamakan sistem kelas masyarakat dalam pelajaran, tidak ada pada waktu itu sekolah-sekolah yang dengan bayaran buat orang-orang berada, sekolah-sekolah gratis tanpa bayar buat anak-anak orang yang berkekurangan, kecuali di zaman penjajahan belakangan ini. kaum penjajahan memasukkan sistem kelas-kelas masyarakat dalam alam pendidikan dan mengadakan perbedaan-perbedaan antara anak orang-orang kaya dengan anak orang-orang miskin, dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah rendah, menengah dan tinggi dengan bayaran buat anak si kaya, sekolah rendah secara gratis buat anak si miskin.⁴

Jadi, sebenarnya di dalam konsep pendidikan Islam terwujud prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, persamaan dan kesempatan yang sama buat belajar, tanpa diskriminasi antara si kaya dan si miskin. Kaum muslimin beranggapan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban agama, kewajiban rohaniah, bukanlah suatu jalan untuk meraih keuntungan-keuntungan materi dan kebendaan, di mana siswa belajar dengan sepenuh hati dan didorong oleh kemauan keras dari pihak mereka sendiri. Banyak terdapat siswa muslim yang melakukan pengembaraan dan perantauan yang cukup jauh dan berat demi untuk meneliti sesuatu masalah ilmiah atau masalah agama.⁵

Secara umum, Pendidikan seyogyanya mengantarkan manusia menjadi manusia seutuhnya dengan menggerakkan roda humanisasi. Humanisme sendiri berasal dari kata latin yaitu 'humanitas' yang berarti pendidikan manusia. *Pertama*, Proses humanisasi dapat tercipta jika manusia dalam kondisi apapun ditempatkan sebagai subjek. Artinya setiap manusia memiliki otonomisasi diri dan memiliki kebebasan dalam menentukan jalan hidup dan pilihan tanpa tekanan dari luar. Agar tidak terjadi penundukan kreatifitas maka upaya dialogis merupakan keniscayaan. Setiap manusia harus diajak untuk berdialog dengan menciptakan posisi yang seimbang yaitu subjek dengan subjek bukan subjek dengan objek. *Kedua* yaitu belajar langsung kepada realitas (*learning to the reality*) atau konsiensialisme (aksi-refleksi) dalam istilah Paulo Freire. Setiap manusia (peserta didik) diarahkan untuk mengenali lingkungan mereka (refleksi) sebelum melakukan aksi dan begitu pula sebaliknya. Konsiensialisme akan merangsang manusia untuk bersikap kreatif karena mereka dihadapkan langsung pada realitas kehidupan yang mereka jalani serta menumbuhkan daya kritis manusia dengan mempertanyakan segala hal mengenai diri dan masyarakatnya. Humanisasi dapat tercipta jika setiap manusia memiliki kebebasan untuk berekspresi namun kebebasan tersebut tetap dibalut dalam harmoni.⁶

Senada dengan prinsip di atas, kalau diperhatikan metode pendidikan dalam Islam, seperti di masjid-masjid, institut-institut, lembaga-lembaga ilmiah akan terlihat bahwa pendidikan Islam itu menuju ke arah pembiasaan siswanya untuk berpijak di atas kaki sendiri, maksudnya seorang guru atau dosen di setiap akhir pelajaran, mereka memberikan assignment (tugas) kepada siswa untuk mempelajari isi buku sebelum pelajaran yang akan datang dan mencoba untuk mengerti isi buku tersebut. Bila siswa telah berada di ruang pelajaran, ia mendengarkan guru yang memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan tentang point-point atau bagian-bagian yang sukar dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, menuntun siswa yang membutuhkan tuntunan, membantu yang membutuhkan bantuan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mendiskusikan apa yang membutuhkan diskusi.

⁴*Ibid.*, hal. 8

⁵*Ibid.*, hal. 10

⁶http://ipm.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90:sekolah-dan-hegemoni-kekuasaan&catid=29:artikel&Itemid=58

Dengan jalan demikian, siswa akan terbiasa dengan percaya pada diri sendiri dalam membaca, memahami dan membahas isi pelajaran dan sekaligus terdidik dengan suatu pendidikan yang bebas.⁷

Selain prinsip-prinsip di atas, Pendidikan sebagai sebuah pranata sosial berfungsi melestarikan kebudayaan antargenerasi. Kebudayaan, dengan sendirinya merupakan produk interaksi sosial, di mana di dalamnya saling terjalin faktor-faktor ekonomi, politik bahkan pertahanan keamanan. Masyarakat bukan sebuah benda mati yang inert, tetapi sistem yang dinamik. Kampus dan sekolah berada di tengah masyarakat yang bergejolak (kadang evolusioner, namun tak jarang muncul dalam bentuk letupan-letupan revolusi). Maka pendidikan tidak mungkin lari dari persoalan-persoalan sosial, betapapun diklaim bahwa warga kampus memiliki keunikannya sendiri sebagai bagian dari komunitas intelektual. Kebudayaan yang hidup di kampus tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan yang menghegemoni (mendominasi paling kuat) masyarakat. Artinya, sistem pendidikan yang diberlakukan oleh suatu rejim mencerminkan tipe kebudayaan yang ingin dilestarikan oleh rejim sebagai otoritas hegemoni.⁸

Kenyataan yang terjadi pada masa sekarang adalah bahwa Sekolah dengan berbagai macam aturan akademik, kurikulum, dan proses belajar-mengajar yang terjadi didalam kelas, ternyata memiliki potensi untuk menciptakan Dehumanisasi. Dehumanisasi menurut Paulo Freire adalah keadaan kurang dari manusia atau tidak lagi menjadi manusia. Dehumanisasi dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi yang menempatkan manusia sebagai objek oleh manusia lainnya maupun oleh sistem. Di dalam kurikulum pendidikan yang selama ini ditentukan oleh pemegang kebijakan dan kemudian ditasbihkan oleh guru atau dosen sebagai subjek di dalam kelas, ternyata hanya menempatkan peserta didik sebagai objek pendidikan. Selain itu, kurikulum yang bersifat sentralistik tidak memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk mengaspresiasi kehendak mereka. Masyarakat terutama peserta didik tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan mengekspresikan pendapat mereka. Ketika peserta didik tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan pendapatnya, tidak diberikan kesempatan untuk “membantah” teori yang telah di(mapan)kan, serta pengindoktrinasi dan tindakan represif yang berujung pada hilangnya kebebasan, maka akan menyebabkan posisi yang tidak seimbang dalam proses belajar-mengajar yang akhirnya menyebabkan dehumanisasi. “Guru adalah subjek dan murid adalah objek, guru tahu segalanya dan murid tidak tahu apa-apa, guru memberi dan murid hanya menerima”. Murid mau tidak mau harus mengikuti titah sang guru walaupun tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Mereka dipaksa untuk melakukan konformitas dengan kurikulum yang siap pakai dan mengikuti keinginan guru di dalam kelas. Selain itu, pemasangan kreatifitas dengan tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi, akan menciptakan-meminjam istilah Erich Fromm- makhluk Automaton. Automaton adalah makhluk hidup yang bergerak dan ‘berfikir’ serupa mesin dan serba otomatis. Manusia jenis ini adalah manusia yang kehilangan individualitas dan otonomisasi diri. Mereka mengikuti segala macam aturan dan kekuatan yang berasal dari luar dirinya serta tidak memiliki kekuatan kritis. Lewis Yablonsky menyebutnya Robopath.⁹

⁷M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar.....*, hal., 14

⁸<http://www.ganeshazine.8m.com/Ganeshalama/25/Pendidikan%20dan%20Hegemoni%20Budaya%20Kapitalisme.htm>

⁹http://ipm.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90:sekolah-dan-hegemoni-kekuasaan&catid=29:artikel&Itemid=58

Melihat kondisi pendidikan yang demikian itu karena memang Pendidikan—di satu sisi-- memiliki hubungan yang sangat erat dengan prosesi politik suatu Negara. Ketika pemerintahan cenderung korup dan ingin memapankan kekuasaan, maka pendidikan dijadikan sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi dan penginjeksian dogma-dogma agar rakyat patuh terhadap Negara. Selain itu, tradisi pendidikan—lebih-lebih di Indonesia—tidak diarahkan untuk mengenali kondisi realitas masyarakat secara mondial. Dengan kata lain bahwa pendidikan tidak berhubungan dengan dunia politik dan sosial kemasyarakatan. Para pemuda, pelajar dan mahasiswa tidak perlu mencampuri urusan politik apalagi politik praktis cukuplah mereka giat belajar dan mencari pekerjaan setelah mendapatkan gelar kesarjanaan. Pola seperti ini pernah dipraktekkan oleh rezim orde baru dengan menerapkan peraturan akademik NKK/BKK (Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Koordinasi Kampus). Manusia naif, walaupun menyadari bahwa terdapat kejanggalan dan sistem yang menindas dimana mereka hidup, namun mereka tidak mengkritiknya. Akan tetapi, mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang menindas tersebut. Mereka akan “merefomasi diri” agar dapat ikut menikmati kekuasaan dari sistem. Ciri-ciri manusia naif yaitu *pertama*, tak punya dorongan untuk berfikir dan mencari kebenaran karena mereka tidak kritis dan cenderung menerima sesuatu yang telah ada sebelumnya. *kedua*, tidak mempunyai inisiatif dalam mengambil keputusan sendiri. Gejala-gejala manusia naif seperti ini dapat kita lihat pada perilaku peserta didik kita yang takut untuk mengutarakan pendapat mereka sendiri, tidak kritis, dan cenderung mengikuti apa yang diucapkan oleh guru mereka. Penundukan (*subjugated*) terhadap kreatifitas berfikir telah mengakar kuat dalam sistem pendidikan kita yang akhirnya menyebabkan masalah-masalah psikologi (*psycological problems*).¹⁰ Kekuasaan berada di mana-mana. Seperti itulah kata Michael Foucault, salah seorang posmodernis yang melihat adanya relasi kuasa bermain di setiap sendi kehidupan kita. Entah kekuasaan itu berada dalam lingkup negara, agama, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Di sekolah misalnya, para guru dan institusi sekolah mempelajari perilaku para siswa agar dapat dikuasai dan dijinakkan.

Hal inilah yang menjadi satu kajian penting dimana pendidikan yang seharusnya bebas, demokratis—sebagaimana ditawarkan dalam Islam—tidak memenuhi tujuan yang diharapkan. Banyak praktek-praktek pendidikan yang tidak berpihak pada yang lemah, bahkan cenderung menguasai dan mendikte apa yang menjadi tujuan pihak penguasa. Untuk mensikapi beberapa persoalan pendidikan belakang ini gagasan Antonio Gramsci tentang hegemoni—mungkin—bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian.

Antonio Gramsci dan gagasannya mengenai hegemoni memberikan gambaran sebuah bentuk strategi perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan kata lain, hegemoni merupakan sebuah upaya memahami seluk beluk kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk merubahnya, sesuai dengan keinginan kelompok yang menghегemoninya.

Melalui pemikirannya, Antonio Gramsci berusaha untuk memahami masyarakat dengan tujuan untuk menanamkan nilai dan ideologi yang dikehendaki guna merubah dan membentuk pola kehidupan dan kesadaran mereka. Perubahan tersebut kadang nyaris tak pernah disadari oleh kelompok yang dihegemoni.

Penanaman nilai dan kesadaran dalam proses hegemoni lebih bersifat terselubung, dimana kelompok yang dihegemoni cenderung mengambil nilai-nilai tersebut dengan cara sukarela, serta cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Meski

¹⁰ *Ibid.*

demikian, hegemoni pun tidak menampik adanya unsur-unsur dominasi dan paksaan jika mengalami kebuntuan kultural.

Dalam konteks pendidikan, hegemoni lebih menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui kepatuhan para peserta didik sehingga upaya tersebut dapat berhasil mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka¹¹.

Dalam hal ini, hegemoni merupakan kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas pendidik, hal yang demikian ini telah terkonstruksi dengan sendirinya pada ruang kesadaran dan pengetahuan para peserta didik sebagai kelas yang dihegemoni. Dititik ini hegemoni tampak menjadi suatu organisasi konsensus yang standar keberhasilannya ditentukan oleh kesepakatan yang diciptakan, ataupun hasil yang diperoleh. Hal yang demikian ini dapat terlihat dari kesepakatan antara guru dan murid yang dihasilkan melalui proses belajar. Dengan demikian dalam pandangan Antonio Gramsci hegemoni adalah hubungan edukasional (*educational relationship*).¹²

Teori hegemoni yang dicetuskan Antonio Gramsci, kurang lebih sebagai berikut.

*Sebuah pandangan hidup dan cara berpikir yang dominan, yang di dalamnya sebuah konsep tentang kenyataan disebarluaskan dalam masyarakat baik secara institusional maupun perorangan; (ideologi) mendiktekan seluruh cita rasa, kebiasaan moral, prinsip-prinsip religius dan politik, serta seluruh hubungan-hubungan sosial, khususnya dalam makna intelektual dan moral.*¹³

Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan sebuah proses penguasaan kelas dominan kepada kelas bawah, dan kelas bawah juga aktif mendukung ide-ide kelas dominan. Di sini penguasaan dilakukan tidak dengan kekerasan, melainkan melalui bentuk-bentuk persetujuan masyarakat yang dikuasai. Bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan). Di sini terlihat adanya usaha untuk menaturalkan suatu bentuk dan makna kelompok yang berkuasa .

John Storey menjelaskan konsep hegemoni untuk mengacu kepada proses sebagai berikut:

...sebuah kondisi proses di mana kelas dominan tidak hanya mengatur namun juga mengarahkan masyarakat melalui pemaksaan “kepemimpinan” moral dan intelektual. Hegemoni terjadi pada suatu masyarakat di mana terdapat tingkat konsensus yang tinggi dengan ukuran stabilitas sosial yang besar di mana kelas

¹¹I Gusti Putu Artha, *Pendidikan Berwatak Hegemonik* (<http://www.balipost.co.id/Balipostcetak>), 6 Mei 2006.

¹²H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan & Pendidikan* (Magelang: Indonesiatara, 2003), hal. 77.

¹³<http://utchanovsky.com/2008/08/teori-hegemoni/>

*bawah dengan aktif mendukung dan menerima nilai-nilai, ide, tujuan dan makna budaya yang mengikat dan menyatukan mereka pada struktur kekuasaan yang ada.*¹⁴

Melihat pemaparan tentang konsep hegemoni yang diuraikan Antonio Gramsci jelas bahwa Gramsci lebih mengutamakan proses yang bersifat saling pengertian dan mendukung baik dari pihak yang mendominasi (kelas dominan—penguasa--), kepada pihak yang didominasi, tidak dengan kekerasan bahkan lebih pada bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai masyarakat dominan dilakukan dengan penguasaan basis-basis pikiran, kemampuan kritis, dan kemampuan-kemampuan afektif masyarakat melalui konsensus yang menggiring kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah sosial ke dalam pola kerangka yang ditentukan lewat birokrasi (masyarakat dominan).

Proses di atas, kalau di hubungkan dengan sistem/proses pendidikan Islam waktu dulu adalah bagaimana antara pihak penguasa (pemerintah) dengan pihak hartawan dan pelaksana pendidikan bisa saling bekerja sama, di mana negara berperan membuat planing dan menyediakan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pendidikan sehingga tujuan dari negara dan pendidikan dapat diraih tanpa adanya unsur kekerasan bahkan terlihat lebih demokratis. Inilah salah satu relevansi pemikiran hegemoni Antonio Gramsci dengan konsep pendidikan Islam, yaitu saling menerima dan memberi antara pihak pemerintah, hartawan dan pelaku pendidikan sehingga terjadi perubahan sosial seperti yang diharapkan.

B. Peran Intelektual Dalam Hegemoni dan Proses Pendidikan

Dalam kaitannya dengan penampakan kepemimpinan moral dan intelektual, Antonio Gramsci memandang bahwa setiap manusia mampu merasa berpikir dan berintelektualisasi, oleh sebab itu peranan kaum intelektual sangat penting menurut pandangan Antonio Gramsci¹⁵.

Gramsci memakai istilah “intelektual” dalam arti luas yang secara praktis ekuivalen dengan “inteligensia” atau semua kelas terdidik. Dan pada umumnya setiap kelas utama memproduksi lapisan intelektualnya sendiri yang bertugas mempertahankan kontinuitas budaya kelas masyarakatnya dan menyatukan mereka berdasarkan solidaritas tertentu.¹⁶

Bagi Gramsci, intelektual organik¹⁷ adalah para intelektual yang tidak sekedar menjelaskan kehidupan sosial dari luar berdasarkan kaidah-kaidah saintifik, tapi juga

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan & Pendidikan*, hal. 77.

¹⁶ <http://nurulhuda.wordpress.com/2006/11/21/perihal-hegemoni-dan-perang-posisi/>

¹⁷ Gramsci memberikan perbedaan antara “intelektual tradisional” dan “intelektual organik”. Intelektual tradisional adalah para intelektual yang menganggap diri mereka – yang menurut Gramsci di sinilah letak kesalahannya – otonom dari kelas sosial mereka, dan kelihatan mencoba untuk menempatkan diri mereka ke dalam sebuah kontinuitas historis di atas dan di luar perubahan sosial-politik (dalam artian mementingkan kepentingan dirinya sendiri). Gramsci memberikan contoh di antaranya para penulis, seniman, filsuf, dan terutama kaum rohaniawan. Mereka adalah kaum intelektual yang membuat cara produksi (kapitalisme) yang mematikan itu menjadi tetap hidup, bahkan memberikan mereka kehidupan. Faktanya mereka berkaitan secara historis dengan kelas sosial yang ter subordinasi dan seakan-akan memberikan keyakinan akan kemerdekaan termasuk di dalamnya menciptakan ideologi, yang umumnya cenderung idealis, untuk menutupi kenyataan akan ide-ide mereka yang sudah usang. Lihat pada <http://tuhan.multiply.com/journal/item/27>

memakai bahasa kebudayaan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman real yang tidak bisa diekspresikan oleh masyarakat sendiri. Intelektual organik adalah mereka yang mampu merasakan emosi, semangat dan apa yang dirasakan kaum buruh, memihak kepada mereka dan mengungkapkan apa yang dialami dan kecenderungan-kecenderungan objektif masyarakat.¹⁸ Peran intelektual sejatinya adalah memberi kritik konstruktif-transformatif di ruang sosial. Sebab, kritik adalah mekanisme efektif untuk menjalankan kontrol. Sasarannya bisa kekuasaan, bisa pula rakyat sendiri. Ia bernilai positif untuk mendorong sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat untuk kembali ke kriteria yang dipandang ideal dan wajar.

Dalam perubahan sosial sangat diperlukan penyusunan dan pengorganisasian suatu lapisan intelektual yang mengekspresikan pengalaman aktual masyarakat dengan keyakinan dan bahasa terpelajar. Artinya kaum intelektual organik ini menghadirkan suara-suara kepentingan masyarakat bawah dengan bahasa budaya tinggi sehingga pandangan dunia, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan kelas bawah meluas ke seluruh masyarakat dan menjadi bahasa universal. Bila tahap ini berhasil, maka jalan semakin lebar bagi kelas bawah untuk melakukan perubahan revolusioner, yakni merebut kekuasaan politik.

Dalam pandangan Gramsci perubahan sosial bukanlah semata-mata upaya menyangkut masalah kekuatan ekonomi dan fisik, tapi juga melibatkan perebutan wilayah kebudayaan dan ideologi: suatu upaya masyarakat bawah untuk membebaskan diri mereka dari budaya kaum borjuis dan untuk membangun nilai budaya mereka sendiri bersama-sama dengan kaum tertindas dan lapisan intelektual yang berpihak. Dalam konteks inilah bisa dikatakan bahwa supremasi intelektual merupakan prakondisi tercapainya kekuasaan politik. Dalam pandangan Gramsci, upaya kaum proletar membangun hegemoni tandingan (*counter-hegemony*) akan sia-sia tanpa keterlibatan secara aktif dari kaum intelektual yang ada dalam kelas pekerja itu sendiri, selain pentingnya peran partai sebagai sebuah organisasi sentral dalam perjuangan.

Gramsci memberikan ilustrasi tentang teoritis sebagai superstruktur, dan alasan untuk memberikan ilustrasi tersebut merupakan alasan untuk melihat secara lebih jelas dan jernih mengenai peran sentral dari kaum intelektual dalam pemikiran Gramsci. Menurut Gramsci “setiap orang adalah intelektual... tetapi tidak setiap orang dalam masyarakat menjalankan fungsinya sebagai intelektual”.¹⁹

Gramsci mengatakan bahwa setiap orang, pada akhirnya, di luar aktivitas profesionalnya, membawa beberapa bentuk aktivitas intelektual, siapa pun, entah seorang ‘filsuf’, seorang seniman, seorang yang memiliki citarasa, dia berpartisipasi dalam memberikan konsepsi pertikular atas dunia, memiliki benang merah kesadaran atas tingkah laku moralnya, dan terlebih lagi memberikan sumbangan terhadap keberlangsungan konsepsi atas dunia atau memodifikasinya, itulah yang membuat dan membawa bentuk-bentuk baru pemikiran menjadi ada”²⁰

Dalam dunia pendidikan, Antonio Gramsci mengatakan, guru sebagai bagian dari kaum intelektual, mempunyai posisi yang istimewa bila dibandingkan dengan kelompok lainnya. Antonio Gramsci menyebutnya dengan kata "elit intelektual", mengingat peran khusus guru dalam pendidikan yang membutuhkan keahlian khusus.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Gramsci, Antonio (1978), *Selections From Prison Notebooks* (Eds. by Quintin Hoare and Geoffrey N. Smith), London: Lawrence and Wishart: 9, bandingkan pada <http://tuhan.multiply.com/journal/item/27>

²⁰ *Ibid.*,

Dalam catatannya yang terdokumentasikan dalam *Lettere Del Carcere*, Antonio Gramsci menegaskan bahwa kerja pengembangan diri seorang pendidik adalah kerja yang tak mudah. Hanya orang yang bisa memahami peserta didiknya secara akrab dan bisa mendampingi mereka sepanjang gerak perkembangan mereka dan bisa memahami jalan mendidik yang mungkin terbaik.²¹

Gramsci juga pernah berpendapat, intelektual tidak sepenuhnya nonpartisan alias menjauhi kekuasaan. Intelektual tidak bisa kehilangan konteks, yakni relasi yang timpang antara penguasa dan rakyat. Relasi yang diwarnai penindasan dan kesewenang-wenangan. Karena itu, intelektual tidak bisa steril dan bebas nilai. Mereka harus bersikap dan menentukan posisi: berada bersama rakyat yang ditindas dan karenanya membangun wacana counter hegemony, atau berada di posisi penguasa dan karenanya kreatif memproduksi hegemony sehingga ide dan gagasan penguasa bisa diterima oleh publik. Gramsci menyebut intelektual model ini sebagai *organic intellectuals*. Tanggung jawab mereka adalah membangun cara pandang dunia yang ‘baru’ untuk menyatukan lapisan bawah (masyarakat) dengan lapisan atas (penguasa). Dengan demikian masyarakat akan setuju dengan gagasan penguasa dan sebaliknya penguasaan atas masyarakat dapat dilanggengkan.²²

Dari uraian di atas—sekurang-kurangnya—peran intelektual bisa disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, komitmen kebangsaan yang pernah diletakkan founding fathers tentang pentingnya sikap mengedepankan nasib dan kebutuhan rakyat daripada memikirkan kepentingan sendiri. Pandangan mainstream saat ini masih memantapkan intelektual di posisi terdidik yang memiliki peran penting dalam setiap perkembangan masyarakat. Karenanya, komitmen kebangsaan adalah sikap yang harus dipegang teguh secara konsisten. *Kedua*, kepekaan atas setiap arah gerak perubahan yang berimplikasi langsung pada masyarakat. Intelektual senantiasa dituntut tanggap menyikapi situasi kebangsaan, terutama atas situasi akhir-akhir ini yang rawan potensi konflik dan disintegrasi. *Ketiga*, memprioritaskan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Intelektual sejati senantiasa bervisi membawa bangsa ke arah yang lebih baik, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi sekadar material reward (keuntungan materi).

Proses Pendidikan Islam juga tidak lepas dari peran penting para intelektual, kaitannya dengan hal ini intelektual bisa diartikan para pemerhati pendidikan dan guru, sebagai pelaksana pendidikan. Oleh karena itu guru diharuskan mempunyai jiwa yang besar dan niat yang tulus demi sebuah perubahan sosial dalam masyarakat.

Guru atau Pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Di pundaknya terletak tanggung jawab dalam mengantarkan peserta didik ke arah tujuan yang telah dicitakan. Secara fungsional, kata pendidik menunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan ini bisa siapa saja dan dimana saja. Di rumah, orang yang melakukan tugas tersebut adalah kedua orang tua, karena secara moral dan teologis merekalah yang diserahi tanggung jawab pendidikan anaknya. Selanjutnya di sekolah tugas tersebut dilakukan oleh guru, dan di masyarakat dilakukan oleh organisasi-organisasi kependidikan dan sebagainya.²³

²¹ A. Pozzolini, *Pijar-pijar pemikiran Antonio Gramsci*, hal. 186

²² Lihat pada Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, 1999.

²³ Abuddin Nata, Prof, Dr., H, MA, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 2001) hal. 62.

Guru sebagai bagian dari kaum intelektual juga menuntut pada kuatnya pengaruh kepemimpinan seorang guru dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk moral maupun intelektual yang turut serta membentuk sikap dan karakter peserta didik yang dipimpinnya. Secara teknis, Abdurrahman Mas'ud menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru, yakni:

1. Seorang guru hendaknya bertindak sebagai *role model*, suri tauladan bagi kehidupan sosial akademis para muridnya, baik di dalam maupun di luar kelas. Guru harus memberi contoh komitmen dan dinamika diri dalam kegiatan-kegiatan akademis dan sosial keagamaan, seperti membaca (baik di perpustakaan maupun di tempat lain), berdiskusi, meneliti, menulis, ataupun kegiatan-kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* (kontrol sosial) yang tercermin dalam ucapan dan tingkah laku sehari-hari.
2. Guru harus menunjukkan sikap kasih sayang kepada siswa; antusias dan ikhlas mendengar atau menjawab pertanyaan; serta menjauhkan sikap emosional dan feodal, seperti cepat marah dan tersinggung karena pertanyaan siswa sering disalahartikan sebagai mengurangi wibawa.
3. Guru hendaknya memperlakukan siswa sebagai subyek dan mitra belajar; bukan sekedar obyek. Pendidikan orang dewasa, *adult education*, yang menekankan belajar mandiri, kemampuan membaca, berfikir kritis, perlu ditingkatkan secara konsisten dalam proses belajar-mengajar. Sudah saatnya guru mengupayakan iklim dialogis/ interaktif di kelas terhadap anak didiknya.
4. Guru hendaknya bertindak sebagai fasilitator, *promotor of learning* yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreativitas siswa, serta interaktif dan komunikatif dengan siswa. Sebagai pembimbing yang arif, guru hendaknya memanfaatkan interaksi dengan siswa sebagai proses peningkatan diri melalui *feedback* konstruktif dari siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung²⁴.

Kaitannya dengan hal di atas, beberapa prinsip dasar yang ada dalam kepemimpinan hegemonik tampak relevan jika dikaitkan dengan tugas, peran dan fungsi guru, yaitu:

1. Mempunyai fungsi intelektual, artinya seorang guru tidak hanya dituntut untuk pandai dan menguasai materi pelajaran yang akan disampaikannya, namun ia juga dituntut agar mampu memainkan perannya secara maksimal dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditargetkan.
2. Mempunyai kharisma dan juga kepemimpinan moral, yakni, seorang guru dituntut untuk mempunyai nilai-nilai moralitas yang tinggi sebagai bentuk contoh keteladanan bagi para murid. Kepemimpinan tersebut akan lebih besar lagi apabila keteladanannya tidak hanya tercermin dalam proses pembelajaran saja, akan tetapi juga dalam kehidupan pribadinya, seperti kehidupan keluarga yang harmonis, serta kepekaan terhadap kondisi sosial disekitarnya.²⁵
3. Akomodatif, yakni seorang guru harus mampu mengakomodir keanekaragaman para peserta didik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
4. Persuasif, yakni seorang guru harus mampu melakukan tindakan persuasif, terutama bagi para peserta didik yang mengalami gangguan dan kesulitan belajar, serta kurang komunikatif. Dalam hal inilah seorang guru dituntut untuk dapat lebih memahami karakter personal para peserta didiknya.

²⁴ Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Pendidikan Nondikotomik*, hal. 202-203

²⁵ Sondang Siagian, *Teori & Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hal. 105.

5. Partisipatif, yakni mampu menjadikan suasana pembelajaran lebih hidup dengan tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai obyeknya, namun juga menjadikan mereka sebagai obyek sekaligus subyek dalam proses pembelajaran.
6. Efektif dalam menggunakan otoritas dan kekuasaannya sebagai guru, yakni mampu mengelola kelas yang diasuhnya dengan sebaik-baiknya. Seorang guru yang dapat mengelola kelas dengan baik akan sangat berpengaruh pada kelancaran dan keberhasilan pembelajaran.

Jadi jelas bahwa peran intelektual—sebagaimana pemahaman di atas—, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam strategi perjuangan untuk merubah sistem pranata sosial sangatlah penting. Antonio Gramsci sangat membutuhkan peran dan partisipasi aktif dari para intelektual, yang dalam istilahnya dinamakan intelektual organik untuk mencapai keberhasilan dari gagasan-gagasannya tentang hegemoni, begitu juga dunia pendidikan sangat memerlukan sosok guru, sebagai pelaku pendidikan, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pemikiran Antonio Gramsci tentang Hegemoni dan Konsep Pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hegemoni adalah sebuah upaya pemahaman akan suatu kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk merubahnya. Hegemoni menunjuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, yang membentuk sikap kelompok yang dipimpin. Hal ini terjadi dalam citra konsensual yang diciptakan melalui pengaruh terselubung lewat pengetahuan yang disebarkan melalui perangkat-perangkat kekuasaan ataupun dengan pemaksaan. Dengan kata lain, hegemoni adalah sebuah mata rantai strategi memperoleh kemenangan yang lebih banyak di dapat melalui mekanisme konsensus daripada melalui penindasan dan pemaksaan terhadap kelompok lainnya. Hegemoni adalah gagasan penting dalam tulisan-tulisan Antonio Gramsci, meski ia dipakai dalam beberapa pengertian. Gagasan ini muncul berbarengan dengan upaya Antonio Gramsci untuk memajukan revolusi sosialis dalam rangka menghancurkan tatanan dan sistem kapitalisme. Namun Antonio Gramsci menggunakan istilah ini

sebagai konsep yang netral, tidak bersifat baik atau buruk. Artinya, ia menggunakan konsep hegemoni dalam kerangka realitas perjuangan kelompok dalam suatu tatanan masyarakat. Hegemoni suatu kelompok menunjukkan bahwa suatu kelompok tersebut telah mampu mempengaruhi kelompok sosial lainnya untuk menerima nilai-nilai politik, budaya, moral, adat, ajaran agama, ataupun nilai-nilai lainnya yang dikehendaki. Proses perebutan pengaruh tersebut dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.

2. Konsep Pendidikan Islam yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk manusia berakhlak mulia, punya kepribadian, bersikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Tujuan Pendidikan Islam tidak lain adalah mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah SWT sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati. Konsep pendidikan Islam tidak mengenal sistem kelas, siapa pun berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan Islam mengandung beberapa prinsip yang meliputi (1) Prinsip Integrasi, (2). Prinsip keseimbangan, (3). Prinsip Persamaan, (4). Prinsip Pendidikan seumur hidup, (5). Prinsip Keutamaan.
3. Pemikiran hegemoni yang digagas oleh Antonio Gramsci jika ditelaah dengan kaca mata konsep Pendidikan Islam mempunyai kesamaan dalam beberapa hal, *pertama*, Hegemoni lebih menekankan kesadaran, keterbukaan, demokratis, hal ini sesuai dengan semangat konsep Pendidikan Islam, *kedua*, Gramsci sangat menghormati dan menghargai serta menekankan peran penting dari para intelektual organik dalam melakukan perubahan sosial sebagaimana peran pendidik atau guru dalam melakukan perubahan dan transformasi ilmu pengetahuan serta pandangan peserta didik dan masyarakat akan pentingnya perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pozzolini, *Pijar-pijar pemikiran Antonio Gramsci*, Yogyakarta: Resist Book, 2006.
- A. Warid Khan, *Membebaskan Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Istawa. 2002
- Abdul Fatah Jalal, *Azas-azas Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
- Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa, 2000
- Abdurrahman Shaleh, *Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdurrohman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam; dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.
- Abuddin Nata, Prof, Dr., H, MA (ed), *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- _____, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 2001.
- Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ahmad D. Marimba, Drs, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Antonio Gramsci, *Sejarah dan Budaya*, Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000.
- _____, *Selections From Prison Notebooks* (Eds. by Quintin Hoare and Geoffrey N. Smith), London: Lawrence and Wishart 1978.

_____, *Further Selections From The Prison Notebooks*, London: ElectricBook, 1999.

_____, *Political Writings 1910-1920*, London: ElectricBook, 1999.

_____, *Political Writings 1921-1926*, London: ElectricBook, 1999.

_____, *Selection From Political Writings 1910-1920*, London: ElectricBook, 1999.

_____, *Selection From Political Writings 1921-1926*, London: ElectricBook, 1999.

_____, *Selection From The Prison Notebooks*, London: ElectricBook, 1999.

_____, *The Modern Prince and Other Political Writings*, ed. Louis Marks, London, 1957.

Badruddin, *Tanggung Jawab Kaum Intelektual (Study Comparatif Antara Pandangan Antonio Gramsci & Ali Syariati)*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1999.

Deddy Iskandar, "Mengenal Dan Mengkritik Gramsci" dalam buku *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Yogyakarta: Averroes Press bekerja sama dengan Pustaka Pelajar. 2001.

Edy Haryadi, *LENIN, Pikiran Tindakan dan Ucapan*, Yogyakarta: Komunitas studi Untuk perubahan, 2000.